

ABSTRAK

Siti Nur Azizah, 126103201034, Problematika Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Mahasiswa UM Terhadap Hak Berpendapat (Analisis UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;; UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Ahmad Gelora Mahardika, S.IP., M.H.,

Kata kunci: *Peraturan Rektor, Mahasiswa Berpendapat, Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia*

Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat, disusun dan disahkan oleh pihak Rektorat sebuah Universitas atau Perguruan Tinggi setingkatnya. Pembentukan Peraturan Rektor harus berdasarkan pedoman yang ada (sesuai dengan hierarki perundang-undangan). Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya tumpang tindih antara peraturan yang berada di atasnya. Sebagai contoh Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Mahasiswanya, dimana penulis menemukan beberapa problematika seperti: mahasiswa dalam mengutarakan pendapat harus melalui beberapa prosedur dengan surat pemberitahuan/izin tertulis yang diberikan kepada pihak Rektor/Dekan atau ketua bagian lainnya, dll.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa UM terhadap hak berpendapat (2) Bagaimana perbandingan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang dengan Universitas Gadjah Mada? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa Universitas Negeri Malang terhadap hak berpendapat (2) Untuk mengetahui perbandingan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang dengan Universitas Gadjah

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena dalam penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sedangkan dalam menganalisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil daripada penelitian ini adalah: (1) Penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hak, Kewajiban dan Larangan mahasiswa UM, dimana dalam penerapannya kurang maksimal karena adanya pengakuan dari beberapa narasumber yang mana peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ada didalam peraturan rektor ini, seperti : *Pertama*, beberapa pasal ada yang tidak sejalan dengan konstitusi serta beberapa Undang-Undang lainnya. *Kedua*, ada pasal yang tidak jelas terkait makna dalam penafsiran

setiap individu. *Ketiga*, peneliti menemukan fakta terkait unjuk rasa/demonstrasi mahasiswa UM yang memilih untuk melanggar peraturan demi mereka dapat melaksanakan unjuk rasa/demonstrasi tersebut. Serta hak berpendapat di Universitas Negeri Malang dalam kalangan mahasiswa selaku anggota LPM (Lembaga Pers Mahasiswa), yang dimana ketika mereka bersuara sering mendapat panggilan sesuai menulis opini tentang kampus. (2) Perbandingan antara Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Mahasiswa dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711 Tahun 2013 Tentang Tata Perilaku Mahasiswa, kedua Peraturan Rektor ini membahas terkait hak, kewajiban, perilaku, larangan serta sanksi yang didapat mahasiswa ketika melanggarnya. Namun ada perbedaan dalam kedua peraturan ini, dimana pada peraturan Rektor Universitas Negeri Malang ini hak mahasiswa dalam berpendapat terbatas, maksud daripada terbatas ketika mahasiswa ingin mengikuti aksi demonstrasi yang mengatasnamakan UM harus dengan surat pemberitahuan dan surat izin yang diberikan kepada Rektor, Dekan dan juga ketua jurusan masing-masing. Tetapi tidak pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada dimana mahasiswa haknya terbagi menjadi hak pribadi, hak sebagai masyarakat, hak sebagai warga kampus dan hak sebagai warga negara yang mana hak berpendapat termasuk kedalam hak sebagai warga negara.

ABSTRACT

Siti Nur Azizah, 126103201034, Problematika Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Mahasiswa UM Terhadap Hak Berpendapat (Analisis UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;; UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Ahmad Gelora Mahardika, S.IP., M.H.,

Kata kunci: *Peraturan Rektor, Mahasiswa Berpendapat, Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia*

Chancellor's Regulations are regulations made, drafted and ratified by the Rectorate of a University or Higher Education of the same level. The formation of Chancellor's Regulations must be based on existing guidelines (in accordance with the statutory hierarchy). This aims to ensure that there is no overlap between the regulations above. For example, Malang State University Chancellor's Regulation Number 13 of 2019 which regulates the Rights, Obligations and Prohibitions of Students, where the author found several problems such as: students in expressing opinions must go through several procedures with a written notification/permission given to the Chancellor/Dean or heads of other sections, etc.

The formulation of the problem in this research is: (1) How is the implementation of the Malang State University Chancellor's Regulation Number 13 of 2019 concerning the rights, obligations and prohibitions of UM students regarding the right to express their opinion (2) How does the Malang State University Chancellor's Regulation compare with Gadjah Mada University? The aims of this research are: (1) To find out the application of the Malang State University Chancellor's Regulation Number 13 of 2019 concerning the rights, obligations and prohibitions of Malang State University students regarding the right to express opinions (2) To find out the comparison of the Malang State University Chancellor's Regulations with Gadjah University Mada.

The type of research used is normative juridical because this research is based on library sources to discuss the problems that have been formulated. The approach used in this research is a statutory approach. Meanwhile, analyzing the data uses descriptive analysis techniques.

The results of this research are: (1) Implementation of Malang State University Chancellor's Regulation Number 13 of 2019 concerning the rights, obligations and prohibitions of UM students, where the implementation is less than optimal due to confessions from several sources where the researcher found several problems contained in this Chancellor's regulation , such as: First, several articles are inconsistent with the constitution and several other laws. Second, there are articles that are unclear regarding the meaning in each individual's interpretation. Third, researchers discovered the fact that there was a demonstration/demonstration

of UM students who chose to break the rules so that they could carry out the demonstration/demonstration. As well as the right to express opinions at the State University of Malang as members of the LPM (Student Press Institute), where when they speak out they often receive calls after writing opinions about the campus. (2) Comparison of Malang State University Chancellor's Regulations Number 13 of 2019 concerning the Rights, Obligations and Prohibitions of UM Students with the Gadjah Mada University Chancellor's Regulations concerning Student Code of Conduct, these two regulations discuss the rights, obligations, behavior, prohibitions and sanctions that students receive when breaking it. However, there is a difference between these two regulations, where in this Regulation of the Chancellor of the State University of Malang, students' rights to express their opinions are limited, meaning that when students want to take part in a demonstration on behalf of UM, they must obtain a notification letter and permission letter given to the Chancellor, Dean and also the Head of Department. each. However, this is different from the Gadjah Mada University Chancellor's Regulations where student rights are divided into personal rights, community rights, campus citizen rights, and citizen rights, where the right to express opinions in this regulation is included in the rights as citizens which are protected by the state.

